

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- 
- Achmad Roestandi. 2008. *Mengapa Saya Berhenti Pindah?.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Achmad Rubaie. 2017. *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi.* Surabaya: Laksbang Pressindo Yogyakarta dan Kantor Advokat "Hufron & Rubaie."
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim.* Cirebon: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cetakan ke 16.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayu Media.
- Martita. 2013. *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legiature ke Positive Legiature.* Jakarta: Kompas.
- Mardani. 2016. *Etika Profesi Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh. Mahfud MD. 2009. *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu.* Jakarta: Rajawali Pers. Cet. II.

Maruarar Siahaan. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar

Grafika.

Roscoe Pound. 1996. *Pengantar Ilmu Filsafat*, Cetakan ke 5. Diterjemahkan oleh:

Mohammad Radjab. Jakarta: Birara.

Ronald S. Lumbuun. 2011. *Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Raja Grafindo Persada.

Soepono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Soepono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

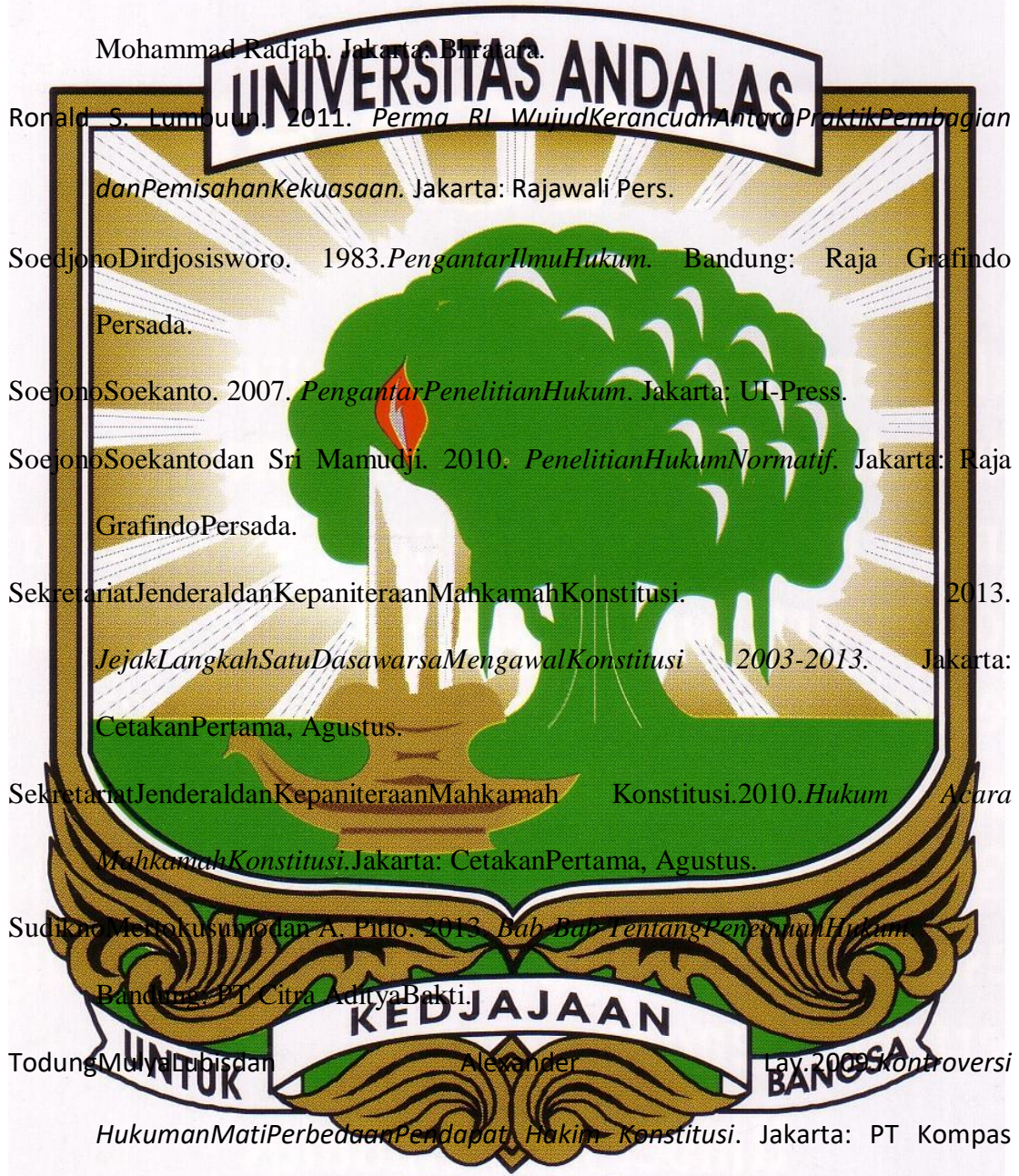
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2013. *Jejak Langkah Satu Dasawarsa Mengawal Konstitusi 2003-2013*. Jakarta: Cetakan Pertama, Agustus.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Cetakan Pertama, Agustus.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pito. 2013. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay. 2009. *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: PT Kompas

Media Nusantara.



VeriJunaidi. 2013. *MahkamahKonstitusiBukanMahkamahKalkulator*. Jakarta: Themis Books. CetakanKedua September.

WildanSuyuthiMustofa. 2013. *KodeEtik Hakim*. Semarang: Kencana. CetakanPertama

## B. PERATURAN-PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Surat Keputusan Bersama Nomor 04/KMA/SKB/IV/2009/02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim.



### C.PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 004/PUU-I/2003

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 066/PUU-II/2004

Tentang Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006

Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PMK/2005

Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 008/PMK/2006

Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-IV/2006

Tentang Pembubaran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-V/2007

Tentang Konstitusionalitas Hukum Acara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Pasal 28

dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48-49/PUU-IX/2011

Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011



Tentang Mahkamah Konstitusi.

#### D. WEBSITE

Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Juni 2015, 22/03/2015, hlm 219, <https://media.neliti.com/media/publications/110883-ID-prinsip-kebebasan-hakim-dalam-memutus-pe.pdf>.

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hakim\\_konstitusi\\_Indonesia/](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hakim_konstitusi_Indonesia/)

[www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3)

#### A. MAKALAH, JURNAL

Ditjen. Badilumtun Departemen Kehakiman, *Kebebasan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Disajikan dalam Panel Diskusi Kebebasan Hakim Dalam Negara Indonesia Yang Berdasarkan Atas Hukum*. Yang diselenggarakan oleh Ditjen. Badilumtun Departemen Kehakiman. Jakarta: 1995.

Ditjen. Badilumtun Departemen Kehakiman. *Kebebasan Hakim Sebagai Jaminan Dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman*. disajikan dalam Panel Diskusi Kebebasan hakim dalam Negara Indonesia yang berdasarkan Hukum. Yang diselenggarakan oleh Ditjen. Badilumtun Departemen Kehakiman. Jakarta: 1995.

Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam buletin Komisi Yudisial, diakses melalui <http://www.google.com> pada tanggal 26 April 2018.